



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWASAN**

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 58, RT 1 RW 2, Cempaka Putih Timur, Kec. Cempaka Putih
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10510
www.bawas.mahkamahagung.go.id, informasi.bawas@mahkamahagung.go.id

Nomor : 3668/BP/PW1.1.1/IX/2025 Jakarta, 08 September 2025
Lampiran : -
Hal : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja pada Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara Jakarta Tahun 2024

Yth.

Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
Jalan Cikini Raya Nomor 117, Jakarta Pusat
DKI Jakarta

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disampaikan hal-hal berikut:

- Evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dimaksudkan untuk:
 - memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
 - menilai tingkat implementasi SAKIP;
 - menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
 - memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan
 - memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.
- Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen manajemen kinerja, yang meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.
- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memperoleh nilai sebesar **72,75 atau BB (Sangat Baik)**.
- Nilai tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja, dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			2023	2024
1	Perencanaan Kinerja	30,00	21,60	21,60
2	Pengukuran Kinerja	30,00	21,00	21,60
3	Pelaporan Kinerja	15,00	10,50	10,80
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	17,50	18,75
Nilai Akuntabilitas Kinerja			70,60	72,75



Predikat	BB (Sangat Baik)	BB (Sangat Baik)
-----------------	----------------------------	----------------------------

No	Catatan
A. Perencanaan Kinerja	
1.	Telah terdapat SOP yang mendukung pencapaian kinerja namun belum disertai laporan yang menunjukkan kinerja tercapai berdasarkan aktivitas sesuai SOP.
2.	Target yang ditetapkan belum sepenuhnya memenuhi kriteria sebagai kinerja yang baik (menantang) karena meskipun capaian atas IKU Persentase Penyelesaian Perkara Tepat Waktu selalu melampaui target yang ditetapkan, namun target yang ditetapkan pada tahun berikutnya pada Perjanjian Kinerja cenderung dibawah nilai realisasi kinerja dengan waktu penyelesaian perkara yang masih mengacu pada batas waktu 3 (tiga) bulan.
3.	Penyusunan dokumen monitoring evaluasi Rencana Aksi belum sesuai dengan Surat Sekretaris Mahkamah Agung No. 1282/SEK/OT.01.1/7/2023 tanggal 17 Juli 2023, Hal Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi AKIP Mahkamah Agung Tahun 2022.
B. Pengukuran Kinerja	
1.	Pengumpulan data kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi) namun masih belum memadai.
C. Pelaporan Kinerja	
1.	Informasi dalam laporan kinerja belum selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.
D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	
1.	PTTUN Jakarta telah menindaklanjuti rekomendasi pada LHE AKIP, namun untuk format tindak lanjut laporan hasil evaluasi AKIP belum sesuai dengan Lampiran IV. Surat Sekma No. 1282/SEK/OT.01.1/7/2023.
2.	Belum terdapat penjelasan tentang dampak kenaikan/penurunan nilai pada komponen evaluasi AKIP terhadap perbaikan serta peningkatan akuntabilitas kinerja unit kerja.
3.	Belum terdapat penjelasan tentang perbaikan kualitas capaian kinerja ataupun efisiensi kinerja atas dasar kenaikan/penurunan nilai pada komponen AKIP tertentu.

No	Rekomendasi
A. Perencanaan Kinerja	
1.	Agar ke depannya dapat dibuatkan laporan yang menunjukkan kinerja tercapai berdasarkan aktivitas sesuai SOP, dapat berupa matriks yang mengaitkan antara SOP terhadap Indikator Kinerja unit kerja.
2.	Dalam melakukan penyusunan dokumen perencanaan kinerja, agar penetapan target memperhatikan target kinerja jangka menengah, pencapaian kinerja sampai dengan periode evaluasi, serta memperhatikan monitoring atas capaian realisasi pada tahun berjalan.
3.	Dalam penyusunan dokumen monitoring evaluasi Rencana Aksi agar disesuaikan dengan format pada Surat Sekretaris Mahkamah Agung No. 1282/SEK/OT.01.1/7/2023 tanggal 17 Juli 2023, Hal Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi AKIP Mahkamah Agung Tahun 2022.
B. Pengukuran Kinerja	



No	Rekomendasi
1.	Agar kedepannya seluruh data kinerja dari masing-masing bagian dapat dihimpun dan dikelola secara elektronik (misalnya dengan menggunakan excel atau shared spreadsheet).
C. Pelaporan Kinerja	
1.	Agar ke depannya dapat juga disajikan narasi atau dokumentasi yang menjelaskan mengenai budaya kinerja yang berubah akibat Indikator Kinerja masing-masing.
D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	
1.	Agar dokumen tindak lanjut hasil evaluasi akuntabilitas penyusunannya memperhatikan Surat Sekretaris Mahkamah Agung No. 1282/SEK/OT.01.1/7/2023 tanggal 17 Juli 2023, Hal Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi AKIP Mahkamah Agung Tahun 2022.
2.	Agar ke depannya, unit kerja dapat memberikan narasi penjelas atau matriks pembantu tentang perbandingan kondisi peningkatan AKIP yang terjadi terhadap masing-masing kenaikan/penurunan nilai masing-masing komponen.
3.	Agar ke depannya, unit kerja dapat memberikan narasi penjelas atau matriks pembantu tentang perbandingan capaian IKU yang terkait terhadap masing-masing kenaikan/penurunan nilai masing-masing komponen.

Demikian hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tahun 2024, agar rekomendasi yang disampaikan dapat ditindaklanjuti dan dijadikan sebagai sarana peningkatan kinerja di lingkungan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. Adapun tindak lanjut hasil evaluasi disampaikan dalam jangka waktu paling lama sebelum penyampaian laporan kinerja tahun berikutnya melalui aplikasi seMAr (<https://bawasmari.mahkamahagung.go.id/seMAr>). Terhadap unit kerja yang tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Badan Pengawasan
Mahkamah Agung RI,
Ditandatangani Secara Elektronik



Suradi

Tembusan:

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI;
3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN.

